

**PERANAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPSI  
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA PASIR PEUTEUY  
KECAMATAN CADASARI KABUPATEN PANDEGLANG**

**Hengki Bayage, Ipah Mulyani**

Ipahfury12@gmail.com

Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Niaga STIA Banten

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pemembangunan Desa di Desa Pasir Peuteuy Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif (Pendekatan Kualitatif). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu kumpulan data dengan mengadakan pendekatan pengamatan langsung dengan objek peneliti dan wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan responden maupun informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data primer dan sekunder. Adapun yang menjadi inti dalam penelitian ini adalah unsur penyelenggara pemerintah Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan informan yang terlibat sebanyak 7 orang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pemembangunan Desa di Desa Pasir Peuteuy Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang, telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menerapkan peraturan bersama masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Hal ini terbukti dengan kemampuan Peranan pemerintah Desa, tidak hanya menampung dan menyalurkan saja, tetapi camat juga merealisasikan aspirasi masyarakat tersebut, dalam bentuk peraturan Desa walaupun tidak semua aspirasi namun dijadikan peraturan Pemerintah Desa di Kecamatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan, masyarakat adalah pola kerja sama untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat menjadi sejahtera, mandiri, fasilitas yang baik, agar hari esok lebih baik dari pada hari ini.

Kata Kunci : Peranan Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dimana didalamnya ada yang mengatur tentang Desa. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintah Desa yaitu penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan umum termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-

royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintah Desa. Dengan demikian fungsi Kepala Desa terhadap pembangunan desa adalah sebagai pemikir, perencanaan, dan pelaksana.

Untuk dapat memberikan hasil yang optimal di dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi Pemerintah Desa maka diperlukan adanya kemampuan dan kemauan yang memadai baik dari fasilitas pendukung, termasuk juga kondisi pekerjaan yang di laksanakan sehingga akan dapat di

arahkan kepada adanya kesatuan tindakan yang pada akhirnya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik bagi kemajuan Desa tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya kemampuan, kemauan serta sarana yang dapat mendukung kelancaran proses pelaksanaan pembangunan Pemerintah Desa.

Adanya keinginan masyarakat untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dicapai, sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan pemerintah Desa yang ditujukan untuk meningkatkan peranan aparatur Pemerintah Desa. Pelaksanaan program pembangunan pemerintah Desa oleh Kepala Desa dan perangkat Desa dapat berjalan baik jika ada peran dari Pemerintah Desa dan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi terhadap nilai sosial yang harus tetap dijaga dan dipatuhi bersama, seperti nilai-nilai sosial, budaya dan ekonomi.

Desa Pasir Peuteuy dipimpin oleh Kepala Desa, dan di bantu oleh Sekretaris Desa dalam menyalankan roda Pemerintahan dan urusan administrasi Pemerintahan. selain itu juga, di bantu oleh beberapa Kepala urusan seperti Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan, dan Kepala urusan pembangunan hingga ketua RT dan RW. Namun demikian berdasarkan pengamatan penulis di lapangan menunjukan bahwa, kegiatan Program pembangunan Pemerintah Desa di Desa Pasir Peuteuy Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang masih belum terlaksana sepenuhnya dan gambaran umum masyarakat Desa Pasir Peuteuy adalah masih kurang partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Pemerintah Desa.

Di Desa Pasir Peuteuy Kecamatan Cadasari, terlihat bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya

terlaksana, contoh kongkret dalam musrembang Desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam bentuk, ide pikiran, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Maka kurangnya partisipasi baik itu proses pelaksanaan pembangunan secara umum maupun termasuk dalam bentuk partisipasi masyarakat yang bersifat simbolik, dapat terlihat dari upaya penyampaian informasi dan komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat, kesempatan bagi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang telah terlaksana di Desa masih belum mencapai contohnya air bersih. Substansi pembangunan partisipatif baik itu dalam tahapan kehadiran dalam forum, penyaluran ide dan gagasan. penetapan pembangunan, sampai pada tahap evaluasi dan kontrol terhadap setiap kebijakan Pemerintah Desa.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Peranan Pemerintah Desa**

Menurut Adisasmita (2006:38-39) aparatur Pemerintah Desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi di dalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu Pemerintah Desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat.

### **Konsep Partisipasi Masyarakat**

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah *partisipasi* adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya

interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain menurut Rahardjo (dalam Krisnha S. Andini dkk 2014:196) Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses menevaluasi perubahan yang terjadi.

#### **Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga sifatnya yang dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

#### **Konsep Partisipasi Masyarakat**

Adapun partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berbentuk berbagai macam, yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Keterlibatan menentukan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah. Hal ini bukan saja berlangsung dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial;

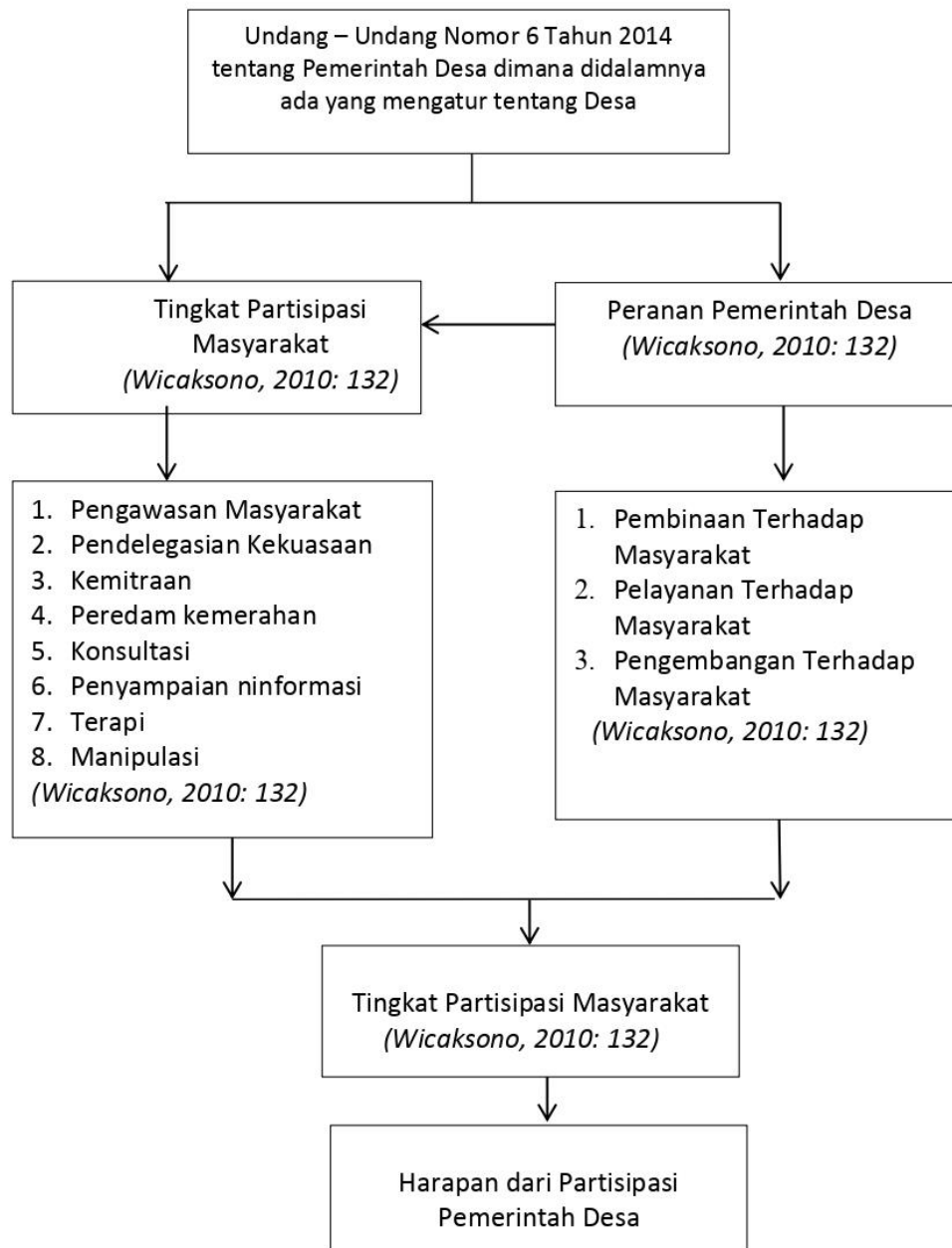
hubungannya antara kelompok kepentingan dalam masyarakat.

2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam hal mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan yang produktif serasi, dan pengawasan sosial atas jalannya pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah maupun golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya di dalam kegiatan produktif melalui perluasan kesempatan dan pembinaan.

Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh ahli. Menurut Sundariningrum (Sugiyah, 2010:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

- a. Partisipasi langsung merupakan partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi tidak langsung merupakan partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Gambar : Skema Kerangka Pemikir



#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini lebih menekankan proses, sikap dan tindakan, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. “Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat dan kepercayaan orang yang akan di teliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan

angka. Dengan penelitian ini, teori yang digunakan dan penelitian tidak di paksakan untuk memperoleh gambaran seutunya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah di teliti” (Sulistyo Basuki, 2006:78).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat analisis,

maka dalam penelitian ini tidak kenal adanya sampel, melainkan informasi. Hal ini di butuhkan untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang di teliti. Dalam informan penelitian yaitu informan kunci dan biasa, informan kunci adalah yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan biasa adalah informasi yang di tentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan masalah. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2006:96), sampel ini lebih cocok di gunakan untuk penelitian kualitatif.

Adapun sampel yang akan di ambil dalam penelitian ini adalah perangkat

Desa dan toko masyarakat sehingga 7 informan terdiri dari:

No.	Informan
1	Kepala Desa
2	LPM
3	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4	Sekretaris Desa
5	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Pimpinan Masyarakat Tani
7	Pimpinan Masyarakat pedagang

#### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para informan, dapat disajikan hasil dari penelitian di atas sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

#### Matrik Pokok Pembahasan

Varial	Aspek		Penjelasan
Peranan Pemerintah Desa	1. Partisipasi masyarakat	Peraturan Desa	Masyarakat sudah Mengetahui Peraturan Desa
		Strategi Pembangunan Desa umum	Sudah berjalan baik implementasi pembangunan Desa
	2. Administrasi Penduduk	Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk	Sudah semua mempunyai
		Kesimpulan Administrasi penduduk	Masyarakat semua mempunyai kartu keluarga dan kartu penduduk sehingga partisipasi masyarakat desa Pasir Peuteuy berjalan baik
	3. Pengaturan keuangan Pemerintah Desa	Rencana	Masyarakat sudah mengetahui Pemerintah Pemerintah Desa
		Kesimpulan Pengaturan keuangan Pemerintah Desa	Masyarakat tidak mengetahui rencana Desa
	4. Administrasi Pembangunan	Pembangunan	Pernah Masyarakat Dilibatkan
		Kesimpulan Administrasi	Masyarakat sudah dilibatkan dalam pembangunan Desa

		Pembangunan	
	5. Administrasi Permusyawaratan	Rapat	Diundang
		Kesimpulan Administrasi Permusyawaratan	Masyarakat diundang dalam rapat di BPD

### SIMPULAN

Tingkat partisipasi masyarakat meliputi: tahap manipulasi dan tahap terapi, termasuk tingkat non partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari adanya informasi pelaksanaan dan adanya undangan program pembangunan. Kemudian tingkat partisipasi masyarakat pada tahap penyampaian informasi, tahap konsultasi, dan tahap peredam kemarahan termasuk tingkat tanda partisipasi masyarakat dalam kategori cukup tinggi dilihat dari sosialisasi jadwal dalam menyusun program pembangunan dan memberi usulan program pembangunan pada saat musrenbangdes. Kemudian tingkat partisipasi masyarakat pada tahap kemitraan, tahap pendelegasian kekuasaan dan tahap pendelegasian kekuasaan termasuk pada tingkat kekuasaan masyarakat ini termasuk dalam kategori rendah hal ini dikarenakan pemerintah desa belum memberikan kepercayaan secara penuh kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan di wilayah mereka karena ternyata usulan dari masyarakat akan dicocokkan dengan program SKPD terkait yang telah dibuat.

### DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo., 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu Graha Ilmu.  
 Basuki, Sulisty, (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Edi Suharto (2004), *Pengertian pemberdayaan masyarakat dalm bukunya Prof. Dr.H.Haraf Nurcholis*, 2016.  
 Felix A. Nigro & Liyod G. Nigro (2012), *Definisi Administrasi Publik*, dalam buku *Administrasi Publik Modern*.  
 Haryono Suryono (2014), *Pembangunan manusia*, dalam bukunya *pemberdayaan masyarakat di era Global*.  
 Habel Melkias Suwae, (2011) *Membangun kemandirian masyarakat Papua melalui partisipasi masyarakat*, dalam bukunya *Membangun Papua dengan Hati & Kasih*.  
 Husaini, usman, (2009). *Teori Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.  
 Mondong, Hendra. 2011. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Medan: Usu  
 M. Helmi Watoni Satka, 2012. *Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Journal Ilmu Administrasi Negara.  
 Miftahus Surur, 2014. *Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa*. Jombang  
 Pandji Santosa (2008), *Merumuskan definisi kebijakan publik*, dalam bukunya *administrasi publik*.  
 Siti Irene Astuti. D., 2011 *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project*

- Design, Implementation and Evaluation.* Ithaka. Cornell University.
- Sugiyono, (2006). *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta.
- Tjahja Supriatna, 2000 *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan,* Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000 *Prinsip – Prinsip Pembangunan.* Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2000 *tujuan Pembangunan,* Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000 *Pokok-pokok kebijaksanaan Pembangunan,* Rineka Cipta, Jakarta.
- Uphoff dan Cohen. 2007. *Raising Factor Productivity in Irrigated Rice Production : Opportunities with The System of Rice Intensification.* DISIMP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Desa.* Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Wicaksono, 2010. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Kasus: Sistem Polder Banger Kelurahan Muktiharjo, Kota Semarang.* Tesis. Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.